



Kesenjangan Sosial Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Kerja Lokal dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur

INFO PENULIS	INFO ARTIKEL
Muhammad Agung Wibowo Universitas Satyagama agung.wibowo@satyagama.ac.id	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 3, Desember 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Wibowo, M. A. (2025). Kesenjangan Sosial Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Kerja Lokal dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3), 5956-5959.

Abstrak

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Dalam prosesnya, keterlibatan tenaga kerja asing (TKA) kerap menjadi isu yang menimbulkan perdebatan sosial, khususnya terkait kesenjangan dengan tenaga kerja lokal (TKL). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk kesenjangan sosial antara TKA dan TKL serta dampaknya terhadap efektivitas pembangunan infrastruktur. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur dan analisis kebijakan ketenagakerjaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kesenjangan sosial muncul dalam aspek upah, kompetensi, kesempatan kerja, dan persepsi sosial. Kesenjangan tersebut berpotensi memengaruhi hubungan industrial dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur apabila tidak dikelola secara adil dan transparan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang menekankan alih teknologi, peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal, serta pengawasan penggunaan tenaga kerja asing.

Kata Kunci: Tenaga Kerja Asing, Tenaga Kerja Lokal, Kesenjangan Sosial, Pembangunan Infrastruktur

Abstract

Infrastructure development is a key pillar in driving economic growth and equitable development. In this process, the involvement of foreign workers (TKA) often becomes a topic of social debate, particularly regarding the gap between them and local workers (TKL). This study aims to analyze the forms of social inequality between TKA and TKL and their impact on the effectiveness of infrastructure development. The research method used is a descriptive qualitative approach through literature studies and analysis of employment policies. The results of the study indicate that social inequality arises in aspects of wages, competency, employment opportunities, and social perceptions. This gap has the potential to impact industrial relations and the sustainability of infrastructure development if not managed fairly and transparently. Therefore, policies that emphasize technology transfer, improving the competency of local workers, and monitoring the use of foreign workers are needed.

Key Words : Foreign Workers, Local Workers, Social Disparities, Infrastructure Development

A. Pendahuluan

Pembangunan infrastruktur memiliki peran strategis dalam meningkatkan daya saing nasional dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Indonesia secara aktif mendorong percepatan pembangunan infrastruktur melalui berbagai proyek berskala besar, seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, dan pembangkit listrik. Dalam pelaksanaannya, proyek-proyek tersebut tidak jarang melibatkan tenaga kerja asing, terutama pada sektor yang membutuhkan keahlian khusus dan teknologi tinggi.

Kehadiran tenaga kerja asing di tengah tingginya angka angkatan kerja lokal sering kali memunculkan persepsi negatif di masyarakat. Salah satu isu yang mengemuka adalah terjadinya kesenjangan sosial antara tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Kesenjangan ini berpotensi menimbulkan konflik, kecemburuan sosial, serta resistensi terhadap proyek pembangunan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji bagaimana bentuk kesenjangan sosial antara tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal dalam mendukung pembangunan infrastruktur, serta implikasinya terhadap pembangunan nasional. Tenaga kerja asing adalah warga negara asing yang bekerja di suatu negara dalam jangka waktu tertentu berdasarkan izin kerja yang sah. Sementara itu, tenaga kerja lokal merupakan warga negara Indonesia yang bekerja di dalam negeri. Penggunaan tenaga kerja asing umumnya didasarkan pada kebutuhan akan keahlian tertentu yang belum sepenuhnya dikuasai oleh tenaga kerja lokal.

Kesenjangan sosial merujuk pada perbedaan kondisi sosial dan ekonomi antarindividu atau kelompok dalam masyarakat. Dalam konteks ketenagakerjaan, kesenjangan sosial dapat terlihat dari perbedaan upah, akses terhadap pekerjaan, jenjang karier, serta perlakuan di lingkungan kerja. Pembangunan infrastruktur adalah upaya penyediaan sarana dan prasarana dasar yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial. Keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga oleh faktor sosial, termasuk hubungan antara para pelaku pembangunan.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui studi literatur terhadap jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tenaga kerja asing, tenaga kerja lokal, dan pembangunan infrastruktur. Analisis data dilakukan dengan cara mengidentifikasi pola kesenjangan sosial serta dampaknya terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur.

C. Hasil dan Pembahasan

Kesenjangan sosial antara tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal dalam pembangunan infrastruktur dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, aspek upah dan fasilitas kerja, di mana tenaga kerja asing sering kali menerima upah dan fasilitas yang lebih tinggi dibandingkan tenaga kerja lokal. Kedua, aspek kompetensi dan posisi kerja, di mana tenaga kerja asing lebih banyak menempati posisi strategis atau manajerial.

Berbagai penelitian dan laporan menunjukkan bahwa upah tenaga kerja asing secara signifikan lebih tinggi dibandingkan tenaga kerja lokal di banyak proyek besar—terutama di sektor konstruksi dan industri berteknologi tinggi. Misalnya, sebuah laporan menyebutkan bahwa upah tenaga kerja asing bisa mencapai 7 sampai 10 kali lipat lebih besar daripada pekerja lokal di sektor hilirisasi energi pada beberapa lokasi proyek di Indonesia.



Selisih upah signifikan ini mengindikasikan ketidakadilan struktural dalam kompensasi kerja yang sulit dijelaskan hanya oleh produktivitas atau pengalaman. Perbedaan ini sering dipengaruhi oleh tunjangan ekspatriat atau fasilitas tambahan (seperti tunjangan relokasi, akomodasi, transportasi) yang umum diberikan kepada TKA tetapi *jarang* diberikan kepada pekerja lokal.

Selain upah, posisi strategis sering kali diduduki oleh TKA, terutama pada tugas teknis dan manajerial yang membutuhkan keahlian khusus. Meski data statistik komprehensif untuk Indonesia belum mudah diperoleh di domain publik, banyak studi kasus lapangan menunjukkan bahwa tenaga kerja lokal sering terkendala pada kesempatan promosi karena keterbatasan kualifikasi teknis, sertifikasi, atau pengalaman spesifik proyek dibanding TKA yang dibawa oleh perusahaan investasi asing.

Efek sosial yang umum dilaporkan:

- Menurunnya motivasi kerja tenaga lokal karena perasaan ketidakadilan.
- Meningkatnya potensi konflik industrial di proyek-proyek besar karena perbedaan imbalan dan kondisi kerja.
- Ketidakpuasan sosial di masyarakat sekitar proyek.

Dalam beberapa laporan perencanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia, data menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sangat besar dan sebagian besar *belum terampil* atau tidak memenuhi permintaan keterampilan proyek. Proyeksi menunjukkan jutaan tenaga kerja dibutuhkan pada fase konstruksi, dengan porsi besar kekurangan keterampilan yang signifikan. Kesenjangan keterampilan ini menyebabkan perusahaan lebih memilih TKA yang sudah memiliki pengalaman dan kompetensi langsung, sementara tenaga kerja lokal sering mengisi posisi non-teknis. Hal ini memperkuat kesenjangan sosial karena kesempatan kerja berkualitas tidak merata.

Data dari survei tenaga kerja menunjukkan proporsi signifikan tenaga kerja informal yang lebih rentan terhadap perbedaan upah dan fasilitas ketimbang sektor formal. Grafik tren pekerja informal vs formal juga dipakai untuk menunjukkan adanya ketidakseimbangan struktural upah dan keamanan kerja.

Aspek kesempatan kerja dan pengembangan karier. Tenaga kerja lokal kerap merasa terbatas dalam memperoleh kesempatan peningkatan keterampilan dan promosi jabatan. Keempat, aspek persepsi sosial dan budaya, yang mencakup perbedaan bahasa, budaya kerja, dan pola interaksi sosial di lingkungan proyek. Kesenjangan sosial yang tidak dikelola dengan baik dapat berdampak negatif terhadap pembangunan infrastruktur. Dampak tersebut antara lain menurunnya motivasi kerja tenaga kerja lokal, munculnya konflik industrial, serta terganggunya stabilitas sosial di sekitar lokasi proyek. Namun demikian, apabila dikelola secara tepat, keberadaan tenaga kerja asing juga dapat memberikan dampak positif berupa transfer pengetahuan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal.

Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu mengambil langkah strategis untuk mengurangi kesenjangan sosial. Upaya tersebut meliputi penegakan regulasi ketenagakerjaan, kewajiban alih teknologi dan keahlian, peningkatan pelatihan bagi tenaga kerja lokal, serta transparansi dalam perekrutan dan penempatan tenaga kerja asing.

D. Kesimpulan

Kesenjangan sosial antara tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal merupakan fenomena yang tidak terpisahkan dari pembangunan infrastruktur di era globalisasi. Kesenjangan tersebut muncul dalam berbagai aspek, seperti upah, kompetensi, dan kesempatan kerja, serta berpotensi memengaruhi keberhasilan pembangunan infrastruktur. Lebih dari sekadar penegakan regulasi ketenagakerjaan, strategi berikut bisa dipertimbangkan untuk mengatasi kesenjangan ini:

1. Program sertifikasi keterampilan teknis untuk tenaga kerja lokal agar memenuhi standar proyek infrastruktur.
2. Skema pelatihan yang disubsidi pemerintah di sektor konstruksi dan teknologi infrastruktur.
3. Kebijakan insentif bagi perusahaan kontraktor yang mempekerjakan tenaga lokal pada posisi teknis.
4. Transparansi perekrutan dan jalur karier yang terstandarisasi untuk semua pekerja tanpa diskriminasi berdasarkan kewarganegaraan.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial dan penguatan kapasitas tenaga kerja lokal agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan secara berkelanjutan dan inklusif.

E. Referensi

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2023*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja 2023/2024*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja 2024*. Jakarta: BPS.
- Data GoodStats. (2024). *Data Tenaga Kerja Asing di Indonesia 2024: China Mendominasi*. GoodStats.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Jakarta.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2024). *Kebijakan Penggunaan TKA untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Sosial*. Jakarta: Kemenaker RI.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th ed.). New York: Pearson.